

**EVALUASI PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH  
DAERAH (SIPD) DALAM PROSES PERENCANAAN DI SKPD  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**Yosa Mandraguna<sup>1</sup>, Henni Febriawati<sup>2\*</sup>, Afriyanto<sup>3</sup>, Riska Yanuarti<sup>4</sup>, Tresna  
Fatmawati<sup>5</sup>, Wulan Angraini<sup>6</sup>**

<sup>1,3,4,6</sup>Universitas Muhammadiyah Bengkulu, <sup>2,5</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Su'aibah  
Palembang

Email: henni.febriawati80@gmail.com

**ABSTRACT**

**Latar Belakang :** Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan pengelolaan data pembangunan wilayah, data keuangan daerah, serta data pemerintahan daerah lainnya yang sama-sama tersambung guna terlaksananya proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Penerapan aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah khususnya di SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah. Walaupun demikian penerapan aplikasi SIPD ini belum bisa dikatakan sempurna dibandingkan dengan penggunaan aplikasi SIMDA Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui *perceived ease of use* (kemudahan) dan *perceived usefulness* (kebermanfaatan) dalam Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Proses Perencanaan di SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.

**Metode :** Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dimana metode ini digunakan dengan alasan untuk lebih memahami masalah penelitian dengan mengonvergensi (atau mentriangulasi) data kuantitatif yang berupa angka-angka.

**Hasil :** Berdasarkan hasil analisis dengan metode kuantitatif dengan bantuan software SmartPLS 4.0, didapatkan nilai R-Square untuk Kemanfaatan sebesar 0,659 dan nilai R-Square Kemudahan sebesar 0,690. Nilai ini menunjukkan bahwa aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dapat diterima dengan baik dan memberikan dampak kemudahan (*perceived ease of use*), dan kemanfaatan/kemudahan (*perceived usefulness*) kepada petugas operator SIPD.

**Simpulan :** Saran kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Khususnya dan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah umumnya untuk melaksanakan rencana program yang telah disusun.

**Kata Kunci :** Aplikasi, Pemerintah Daerah, Sistem Informasi, SmartPLS 4.0

**ABSTRACT**

**Background:** The Regional Government Information System (SIPD) is the management of regional development data, regional financial data, and other local government data that are both connected for the implementation of the regional development planning process. The implementation of this web-based application aims to accelerate and facilitate the implementation of planning, supervision and evaluation of government public services, especially at the SKPD of the Central Bengkulu Regency Health Office. However, the implementation of the SIPD application cannot be said to be perfect compared to the use of the SIMDA application This study aims to find out the perceived ease of use and perceived usefulness in the Application of the Regional Government Information System (SIPD) Application in the Planning Process at the SKPD of the Central Bengkulu Regency Health Office in 2022.

**Method:** *The research method used is a quantitative method where this method is used for the reason of better understanding the research problem by converging (or regulating) quantitative data in the form of numbers.*

**Results:** *Based on the results of analysis using a quantitative method with the help of SmartPLS 4.0 software, the R-Square value for Benefit was 0.659 and the R-Square value for Convenience was 0.690. This value shows that the application of the Regional Development Information System (SIPD) can be well received and has an impact on perceived ease of use, and perceived usefulness to SIPD operators.*

**Conclusion:** *Suggestions to the Central Bengkulu Regency Health Office in particular and the Central Bengkulu Regency Government in general to implement the program plan that has been prepared.*

**Keywords:** *Application, Local Government, System of Information, SmartPLS 4.0*

## PENDAHULUAN

Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel (Anita Sitawati W. & Rahel Situmorang, 2016). Perencanaan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah, oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu

mencapai sasaran pembangunan daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah. (Salain & Wedena, 2023)

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, 2004) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian penting dari pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan juga dimuat dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024. Berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18

Tahun 2020 lampiran I dimana arah kebijakan RPJMN bidang kesehatan tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju jaminan kesehatan semesta, terutama melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) yang dilaksanakan dan didukung dengan peningkatan upaya promotif dan upaya preventif. Jumlah fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau pelayanan kesehatan primer yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan se Provinsi Bengkulu pada Mei Tahun 2014 Puskesmas 180 unit, Dokter Praktek Pratama 46 unit, Klinik Pratama 3 unit, pada Maret Tahun 2015 Puskesmas 180 unit, Dokter Praktek Pratama 65 unit dan Klinik Pratama 27 Unit (BPJS Kesehatan). Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Tahun 2014 sebanyak 229 unit dan Tahun 2015 sebanyak 272 unit terjadi peningkatan 18,78% (Suryani et al., 2016). Mengatasi pencegahan melalui inovasi dan penggunaan teknologi di sektor kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu prioritas pemerintah ketika merencanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah baik sektor nasional maupun sektor kesehatan (Irawan, 2022).

Dokumen perencanaan yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten dalam melengkai proses perencanaan kabupaten adalah RPJMD. Selanjutnya yaitu penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rencana Pembangunan Daerah memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan, karena dokumen RPD akan digunakan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama menjabat (Nasution & M.Si, 2021). Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Dinas Kesehatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyusun dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan permendagri no 70 tahun 2019 tentang sistem Informasi pemerintahan daerah, serta yang tercantum di pasal 1 ayat 12 sistem informasi pemerintahan daerah yang berikutnya disingkat sipd merupakan pengelolaan data pembangunan wilayah, data keuangan daerah, serta data pemerintahan daerah lainnya yang sama-sama tersambung guna terlaksananya proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu dalam peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Dengan dikeluarkannya Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah maka seluruh SKPD kabupaten Bengkulu Tengah termasuk SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sudah tidak menggunakan aplikasi SIMDA lagi, melainkan untuk sekarang ini menggunakan aplikasi SIPD.

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja/lembaga pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi. SIPD merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah (Deseverians & Wulandari, 2020).

Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah, namun dalam menjalankan program ini tidak lah mudah harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat, berdasarkan observasi awal penulis menemukan beberapa masalah yaitu, karena pada tahun sebelumnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah masih memakai SIMDA dan itu tidak ada terjadi kendala dalam pemakaiannya, akan tetapi pada awal tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri sudah mewajibkan seluruh SKPD menggunakan aplikasi terbaru yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) karena aplikasi tersebut masih sedang dalam tahap uji coba, maka terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh beberapa SKPD khususnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah yang memiliki 21 UPT di tahun 2020. UPT yang termasuk dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari 1 UPT RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah dan 20 UPT Puskesmas (RPD Kabupaten Bengkulu Tengah, 2020).

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah belum sepenuhnya menggunakan Aplikasi SIPD dalam proses perencanaan dan harus di dampingi dengan penggunaan Aplikasi SIMDA didalam proses perencanaan. Hal ini dikarenakan banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan di SIPD seringkali operator SIPD melewati salah satu proses penginputan perencanaan sehingga tahapan dalam perencanaan pada tahun 2020 belum dikatakan sempurna. Belum lagi terkait masalah jaringan SIPD yang sering error sehingga terjadi penghambatan dalam proses penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis), RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah), RKA (Rencana Kerja Anggaran), dan tahapan akhir dari proses perencanaan SKPD adalah terbitnya DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang menjadi dasar atau acuan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam melaksanakan realisasi anggaran dan belanja setiap tahunnya. Pada Tahun 2021 sampai dengan sekarang penerapan Aplikasi SIPD pada SKPD Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah telah mengalami kemajuan, baik secara teknis maupun non teknis. Pada tahun 2020 penerapan aplikasi SIPD dalam proses perencanaan dilaksanakan dalam tahapan penginputan usulan RENJA, RKA, dan DPA. Pada tahun 2021 sampai dengan sekarang semua tahapan perencanaan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah telah menerapkan aplikasi SIPD dan semua tahapan dalam perencanaan tersebut meliputi proses Penginputan Dokumen RENSTRA, RKPD, RENJA, RKA, DPA, sampai dengan proses Pergeseran Anggaran sebelum perubahan, dan perubahan anggaran sudah menerapkan Aplikasi SIPD. Atas dasar inilah peneliti memiliki landasan atau dasar untuk melaksanakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui Kemanfaatan dan Kemudahan Penerapan Aplikasi SIPD dalam Proses Perencanaan di SKPD Dinas

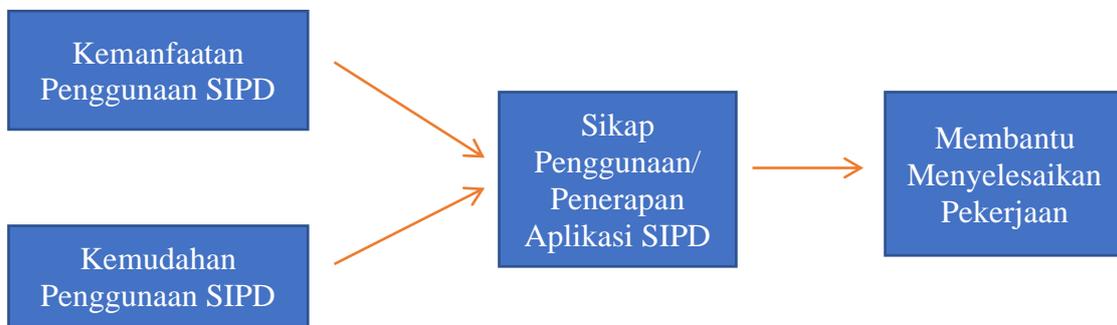
Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.

**METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif dengan mengonvergensi (atau mentriangulasi) data kuantitatif yang berupa angka-angka. Variabel dalam penelitian ini adalah kegunaan/ manfaat teknologi atau sistem aplikasi SIPD terhadap pengguna (*perceived usefulness*, dan kemudahan pengguna menggunakan teknologi atau sistem aplikasi SIPD (*perceived ease of use*). Penelitian ini telah dilaksanakan di Wilayah Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dari tanggal 28 Maret-28 April 2023. Sampel dalam penelitian ini merupakan total populasi yakni ASN yang bertugas menjadi

operator SIPD di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah yang berjumlah 32 Orang.

Sampel ini terdiri dari : 11 orang operator SIPD di Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah, 21 orang operator SIPD di 21 UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah (20 Puskesmas + 1 RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa kuantitatif. menggunakan alat bantu berupa aplikasi *Smart Partial Least Square* (PLS) 4.0. Peneliti membagikan kuisoner kepada operator SIPD yang terdiri dari 32 orang operator.



**Gambar : Kerangka Konsep Penelitian Model Technology Acceptance Model (TAM)**

**HASIL**

Responden dalam penelitian ini merupakan operator aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang terdiri dari 32 Orang Operator SIPD

di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah. Profil responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel 1: Profil Responden**

No	Keterangan	Jumlah	Presentase dari seluruh responden (%)
<b>Jumlah Sampel</b>		<b>32</b>	<b>100</b>
<b>Jenis Kelamin</b>			
1	Laki-Laki	5	15
2	Perempuan	27	85
<b>Tingkat Pendidikan</b>			
1	SD	0	0

2	SMP	0	0
3	SMA	0	0
4	Diploma	3	9
5	Sarjana (S1/S2/S3)	29	91

Model pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Structural Equation Model (SEM) PLS. Uji SEM ini merupakan suatu teknik modeling statistik

yang bersifat sangat cross-sectional, linear dan umum, termasuk analisis faktor (*factor analysis*), analisis jalur (*path analysis*), dan regresi (*regression*).

Langkah pada penelitian ini, yaitu :

#### Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan berhubung dengan adanya prinsip pengukuran kontruk yang berbeda, seharusnya tidak berkolerasi dengan tinggi. Uji diskriminan dinilai dari

*cross loading* > 0,7 dalam suatu variabel (Hartono, 2015). Uji validitas diskriminan dalam penelitian ini menggunakan *software* SmartPLS 4.0. Hasil Penguujiannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Cross Loading**

Variabel	Kemanfaatan	Kemudahan
PEU1	0.818	0.752
PEU2	0.789	0.764
PEU3	0.706	0.709
PEU4	0.812	0.737
PEU5	0.952	0.934
PEU6	0.937	0.923
PEU7	0.936	0.958
PU1	0.708	0.709
PU2	0.760	0.835
PU3	0.877	0.837
PU4	0.841	0.866
PU5	0.718	0.780
PU6	0.805	0.812
PU7	0.898	0.929

Keterangan :

PEU (Perceived Ease Of Use)

PU (Perceived Usefulness)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui hasil perhitungan dari SmartPLS 4.0 bahwa semua indikator dari masing-masing

variabel dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat validitas diskriminan, yaitu nilai *cross loading* > 0.7.

#### Uji Validitas Konvergen

Validitas konvergen berhubung dengan prinsip bahwa pengukuran-pengukuran dari suatu bentuk kontruk seharusnya berkolerasi tinggi. Uji validitas konvergen dalam SmartPLS menggunakan indikator refletif yang dinilai pada *loading factor* (korelasi antara skor item/skor komponen

dengan skor kontruk). Indikator yang digunakan untuk mengukur kontruk tersebut adalah *rule of thumb* yang digunakan untuk validitas konvergen merupakan *outer loading* > 0.7.

Berikut merupakan hasil dari *outer loading* untuk setiap indikator :

**Tabel 3. Outer Loading**

Variabel	Kode	Outer Loading	Keterangan
<b>Persepsi Kegunaan</b> ( <i>Perceived Usefulness</i> )	PU1	0.818	Valid
	PU2	0.789	Valid
	PU3	0.706	Valid
	PU4	0.812	Valid
	PU5	0.952	Valid
	PU6	0.937	Valid
	PU7	0.936	Valid
<b>Persepsi Kemudahan</b> ( <i>Perceived Ease Of Use</i> )	PEU1	0.709	Valid
	PEU2	0.835	Valid
	PEU3	0.837	Valid
	PEU4	0.866	Valid
	PEU5	0.780	Valid
	PEU6	0.812	Valid
	PEU7	0.929	Valid

Berdasarkan Tabel 3 diatas didapatkan hasil bahwa nilai *outer loading* masing-masing indikator memiliki nilai lebih dari

0.7 (>0.7), hal ini menunjukkan bahwa semua indikator telah memenuhi salah satu syarat dari validitas konvergen.

**Uji Reabilitas**

Uji reabilitas ditentukan dengan koefisien dari *cronbach alpha*, *composite reliability* dan *r-square*. Pengujian ini menentukan konsistensi jawaban responden serta

hubungan variabel atas suatu instrument penelitian. Untuk mengukur nilai reabilitas pada suatu konstruk dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4 Uji Reabilitas**

Variabel	Cornbach's Alpha	Composite Reliability	R-Square
<b>Persepsi Kegunaan</b> ( <i>Perceived Usefulness</i> )	0.936	0.947	0.948
<b>Persepsi Kemudahan</b> ( <i>Perceived Ease Of Use</i> )	0.921	0.927	0.946

Berdasarkan Tabel 3 diatas suatu konstruk dikatakan reliable jika nilai *cronbach alpha* dan *composite reliability* diatas 0.60. sedangkan nilai adjust *R-square* dari Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) sebesar 0.948, hal ini memiliki arti bahwa variabilitas konstruk Kemudahan sebesar 94,8% dan sisanya

5,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti. Sedangkan nilai adjust *R-square* dari Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease Of Use*) sebesar 0.946, hal ini memiliki arti bahwa variabilitas konstruk Kemudahan sebesar 94,6% dan sisanya 5,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti.

**Pengujian Hipotesis**

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat *path coefficients* yang menunjukkan koefisien parameter

jika nilai *path coefficients* atau *t statistic* > 0,50 maka adanya hubungan variabel didalam hipotesis (Ghozali dan Latan, 2021).

**Tabel 5. Uji Hipotesis**

Variabel	T Statistic / Path Coefficients
PEU	0.831
PU	0.812

Berdasarkan tabel diatas didapat kan nilai *path coefficients* atau *t statistic* untuk PEU sebesar 0,831, yang artinya bahwa adanya kemanfaatan dalam penggunaan Aplikasi SIPD oleh Operator sedangkan nilai *path*

### PEMBAHASAN

Semua indikator yang digunakan harus dilakukan uji validitas terlebih dahulu, Untuk penelitian ini telah memenuhi salah satu syarat dari validitas konvergen, sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan pengujian oleh para ahli untuk mengevaluasi kelayakan media promosi yang akan digunakan dan dinyatakan layak digunakan dari berbagai aspek yang dinilai, diantaranya aspek materi, manfaat, penggunaan, kesesuaian media, dan aspek visual baru dapat digunakan ke masyarakat sasaran.(Sarkawi et al., 2024)

#### ***Perceived ease of use* (kemudahan) dalam Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Proses Perencanaan di SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.**

Nilai adjust *R-square* dari Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease Of Use*) sebesar 0.690, hal ini memiliki arti bahwa variabilitas konstruk Kemudahan sebesar 69,00% dan sisanya 31,00% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti. Hal ini mengindikasikan bahwa ASN yang bertugas menjadi operator SIPD di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2022, merasakan kemudahan dalam menggunakan aplikasi SIPD pada proses perencanaan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Analisis Technology Acceptance Model (TAM) dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah

*coefficients* atau *t statistic* untuk PU sebesar 0,812, yang artinya bahwa adanya kemudahan dalam penggunaan Aplikasi SIPD oleh Operator

Desa (Siskeudes) di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hasil bahwa adanya dampak kemudahan yang di rasakan oleh operator keuangan desa dalam menggunakan aplikasi Siskeudes (Cornelia, 2020). SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrase pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah. (Ekasaputra Dias, 2021)

#### ***Perceived usefulness* dalam Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Proses Perencanaan di SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.**

Nilai adjust *R-square* dari Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) sebesar 0,659 hal ini memiliki arti bahwa variabilitas konstruk kegunaan/kebermanfaatan sebesar 65,90% dan sisanya 34,10% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti. Hal ini mengindikasikan bahwa ASN yang bertugas menjadi operator SIPD di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah merasakan kemanfaatan dalam menggunakan aplikasi SIPD pada proses perencanaan untuk membantu

menyelesaikan pekerjaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cornelia didapatkan hasil bahwa adanya kemanfaatan yang dirasakan oleh operator keuangan desa penelitian lain seperti Analisis Technology Acceptance Model (TAM) dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah Desa (Siskeudes) di Kabupaten Sleman Yogyakarta (Cornelia, 2020)..

Penerapan system informasi pemerintahan daerah yang belum terlaksanakan dengan baik biasanya karena kurangnya keefisien dalam hal waktu, dikarenakan banyaknya SKPD yang tidak dapat memasukan data tepat waktu, sesuai waktu yang ditentukan Bappelitbangda. Bappelitbangda sendiri telah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten yang mengoperasikan system informasi pemerintahan daerah, kurangnya kualitas SDM dari SKPD yang mengakibatkan keterlambatan dalam memasukan data perencanaan.(Wurara et al., 2020).

#### **Luaran Membantu Menyelesaikan Pekerjaan**

Keuntungan penerapan alat IT untuk mendukung proses produksi. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Tepat kepada orangnya, tepat waktu, dan tepat nilai adalah tiga pilar yang harus didukung agar informasi yang dihasilkan dapat berguna. Selain yang tidak didukung oleh tiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah (Szafranek, 2016). Efektivitas berjalannya sebuah program Aplikasi SIPD ini diukur dengan Indikator evaluasi terhadap kemanfaatan SIPD dalam menyelesaikan pekerjaan agar kesalahan atau kekurangan tersebut dapat diketahui dan diperbaiki. (Iqbal et al., 2022)

#### **SIMPULAN**

Aplikasi SIPD memiliki kemanfaatan dan kemudahan dalam proses perencanaan

oleh operator di SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.

#### **SARAN**

Saran untuk Dinas Kesehatan, hendaknya tetap menjalankan proses monitoring, dan evaluasi secara berkala dan teratur terhadap penerapan aplikasi SIPD, mengadakan pelatihan terhadap operator SIPD, dan menganggarkan honorarium untuk petugas operator SIPD. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel eksternal seperti *innovativeness*, *discomfort*, dan *insecurity* sebagai faktor yang dapat mempengaruhi penelitian dengan objek penelitian di kabupaten lain dengan sistem yang lain.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Deseverians, R., & Wulandari, S. (2020). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah*, *XII*(1), 13–30.
- Ekasaputra Dias, N. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPd Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, *21*(April), 62–79.
- Iqbal, M. M., Handayani, S., & Safitri, D. I. (2022). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, *3*(2), 173.  
<https://doi.org/10.33474/jisop.v3i2.11192>
- Ir. Anita Sitawati W., M. S., & Ir. Rahel Situmorang, M. P. (2016). *Sistem Informasi Perencanaan*. 1–36.

- Irawan, A. D. (2022). *Pembangunan Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*. 3(September), 369–373.
- Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Salain, P. P. P., & Wedena, I. K. J. (2023). Penerapan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan Di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 453–458.
- Sarkawi, S., Febriawati, H., Rizal, A. F., & Angraini, W. (2024). Pengembangan Media Promosi Audio Visual Dalam Upaya Pencegahan Hipertensi ASN Di POLTEKKES KEMENKES Bengkulu. *Mitra Raflesia*, 16(1), 74–82. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.37676/jnph.v12i1>
- Suryani, D., Anita, B., Febriawati, H., Yanuarti, R., Pratiwi, B. A., & Saputra, H. (2016). Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Nasional Se Provinsi Bengkulu. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 05(03), 143–150.
- Szafraneck, M. (2016). *INFORMATION SYSTEMS FOR SUPPORTING PRODUCTION PROCESSES IN A COMPANY MANUFACTURING ROOF METAL SHEETS - A CASE STUDY Abstract* : 1023–1031.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. (2004). UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1–32. [http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU\\_NO\\_39\\_TAHUN\\_1999\\_HAM\\_0.pdf](http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU_NO_39_TAHUN_1999_HAM_0.pdf)
- Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–13.